

## **NILAI PENTING SUMBER DAYA BUDAYA KOTAWARINGIN LAMA**

### **IMPORTANT VALUES OF CULTURAL RESOURCES OF KOTAWARINGIN LAMA**

**Muhammad Wishnu Wibisono<sup>1</sup>, Daud Aris Tanudirjo<sup>2</sup>, dan Imam Hindarto<sup>3</sup>**

*<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Arkeologi, Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  
posel: w.wibisono.m@mail.ugm.ac.id; daud.tanudirjo@ugm.ac.id*

*<sup>3</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia; Jalan Gotong Royong II RT3/6, Banjarbaru, Indonesia;  
posel: imambalar@gmail.com*

*Diterima 19 Agustus 2022*

*Direvisi 20 Oktober 2022*

*Disetujui 25 Oktober 2022*

**Abstrak.** Historiografi Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kerajaan Kotawaringin abad ke-17-19 Masehi. Kerajaan Kotawaringin tumbuh dan berkembang sebagai kawasan multietnis Bugis, Dayak dan Jawa. Beberapa sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin, di Kotawaringin Lama, yang masih tersisa adalah Astana Al-Nursari, Makam Kuta Tanah, Masjid Kyai Gede, dan Danau Masoraian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Astana Al-Nursari akan dikembangkan menjadi museum yang berintegrasi dengan ketiga sumber daya budaya lainnya. Rencana pengembangan tersebut diinisiasi oleh keturunan Kerajaan Kotawaringin, yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun demikian, sampai sekarang penelitian mengenai sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin yang menjadi langkah awal rencana pengembangan tersebut masih sebatas studi aspek sejarahnya. Penelitian kali ini ditujukan untuk memahami nilai penting sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin berdasarkan kondisi aktual masa kini. Pemahaman akan nilai penting tersebut diharapkan dapat menggambarkan karakter dan potensi Kotawaringin Barat yang dapat menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya budaya di Kotawaringin Lama, di Kalimantan Tengah, memiliki nilai penting yang dapat menjadi fondasi pengelolaan kawasan cagar budaya yang berintegrasi dengan kawasan lindung geologi. Integrasi pengelolaan dua kawasan lindung tersebut merupakan suatu langkah awal sebelum kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara praktis dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan dan Indonesia secara umum.

**Kata kunci:** Kerajaan Kotawaringin, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat, Sumber daya budaya, Pengelolaan terintegrasi

**Abstract.** *The historiography of Kotawaringin Barat Regency cannot be separated from the existence of the 17th-19th century Kotawaringin Kingdom. The Kotawaringin kingdom grew and developed as a multi-ethnic region of Bugis, Dayak and Javanese. Some of the cultural resources of the Kotawaringin Kingdom, in Kotawaringin Lama, which still exists are the Astana Al-Nursari, the Kuta Tanah Cemetery, Kyai Gede Mosque, and the Masoraian Lake. The interview results suggest that Astana Al-Nursari will be developed into a museum that integrates with the other three cultural resources. The development plan was initiated by descendants of the Kotawaringin Kingdom, supported by the Regency Government of Kotawaringin Barat. However, until today research on the cultural resources of the Kotawaringin Kingdom, which is the first step in this development plan, is still limited to studying the historical aspects of the Kotawaringin Kingdom. This research is aimed at understanding the important value of the cultural resources of the Kotawaringin Kingdom based on current actual conditions. The understanding of these important values is expected to enable the depiction of the characteristics and potential of Kotawaringin Barat which can become the basis for cultural resources management of the Kotawaringin Kingdom. The results show that the cultural resources of Kotawaringin Lama, in Central Kalimantan, have important values that can become the foundation for the management of the cultural heritage region which is integrated with geoconservation. The integration of the management of the two protected areas is a first step before these regions can practically be used to improve people's welfare, especially the people living around the area and Indonesia in general.*

**Keywords:** *Kotawaringin Kingdom, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat, Cultural resources, Integrated management*

## **PENDAHULUAN**

Historiografi Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kerajaan Kotawaringin. Dalam naskah kuno Negarakertagama, nama Kotawaringin disebut sebagai wilayah dari Kerajaan Majapahit. Nama Kotawaringin yang disebut dalam naskah Negarakertagama tersebut merupakan kota dagang karena Kerajaan Kotawaringin baru berdiri pada tahun 1679. Salah satu sumber daya budaya terkait Kerajaan Kotawaringin yang masih tersisa adalah Astana Al-Nursari. Astana Al-nursari merupakan tempat tinggal

keluarga Kerajaan Kotawaringin, bukan istana dalam pengertian tempat tinggal raja. Astana ini dibangun pada tahun 1867 setelah pusat kota pemerintahan berpindah dari Kotawaringin Lama ke Pangkalan Bun. Perpindahan ini terjadi pada masa Raja Kotawaringin ke-9 Masehi (M), yaitu Pangeran Ratu Imanuddin atau bergelar Datuk Kuta Batu (Fadilah 2021).

Melalui diskusi singkat dengan Gusti Samudera, Astana Al-Nursari akan dikembangkan menjadi museum. Selain itu, sumber daya budaya lainnya seperti Masjid Kyai Gede, Makam Kuta Tanah, dan Danau Masoraian akan menjadi objek daya tarik wisata yang terkoneksi dengan Astana Al-Nursari sesuai dengan konteks pemanfaatannya pada masa lalu. Sumber daya budaya merupakan objek yang dapat melestarikan dirinya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB) Pasal 78 Ayat 3. Adapun isi pasal tersebut ialah sebagai berikut (kutipan):

“Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 2010)

Berdasarkan pasal dan ayat tersebut di atas, dapat diketahui pengembangan sumber daya budaya bukan hanya untuk meraup manfaat ekonomis dari sumber daya budaya, melainkan juga untuk melestarikan sumber daya budaya tersebut.

Sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menempatkan pelestarian situs budaya dan kesenian lokal menjadi bagian dari misi pembangunan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2022, sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin berpotensi dimanfaatkan dalam kegiatan pariwisata. Dalam usaha mempercepat pengembangannya, sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin dikelola oleh dua organisasi perangkat daerah kabupaten tersebut, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata. Kedua instansi tersebut mengemban tugas pengembangan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin (Barat 2022).

Hingga saat ini, penelitian mengenai sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian mengenai Kerajaan Kotawaringin beserta peninggalan materialnya hanya berfokus pada aspek sejarah Kerajaan Kotawaringin. Sejatinya, sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin memiliki potensi yang dapat dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lainnya lakukan, penelitian mengenai nilai penting sumber daya budaya berdasarkan kondisi aktual pada tinggalan material Kerajaan Kotawaringin belum pernah dilakukan. Penelitian kali ini berusaha menjabarkan nilai penting sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin. Hasil penelitian terdahulu akan berkontribusi sebagai pijakan dalam pengembangan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin.

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan nilai penting sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin menjadi potensi dan menggambarkan karakter Kotawaringin Barat hingga dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat kualitatif yang fokus terhadap kedalaman data dan narasi yang disusun berdasarkan fenomena, objek maupun tema-tema tertentu yang menjadi fokus penelitian (Veal 2006). Pada umumnya praduga awal dalam kajian atau penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan terus berkembang seiring kemajuan dari proses yang dilakukan, serta biasanya pengumpulan dan analisis data pada penelitian kualitatif dimungkinkan untuk berlangsung secara bersamaan (Veal 2006). Berdasarkan hal tersebut

permasalahan pada penelitian dengan sifat kualitatif cenderung digambarkan secara naratif dan tekstual, pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang dilakukan terbuka dan cenderung berkembang, analisis yang dilakukan melalui identifikasi terhadap tema-tema penting, serta sampel informan berjumlah kecil sehingga tidak dapat dilakukan sebuah generalisasi terhadap populasi (Veal 2006).

Pengumpulan data dalam kajian ini diperoleh melalui wawancara dan studi literatur dengan bahan-bahan yang terdapat dalam surat-surat, catatan harian atau jurnal, kenang-kenangan (*memoirs*) laporan-laporan dan juga kajian-kajian akademis. Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dipergunakan untuk memperkuat analisis dan merumuskan hasil kajian dalam bentuk rekomendasi, baik rekomendasi konseptual maupun teknis.

Berdasarkan pendapat Pearson dan Sullivan, masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan memiliki kesepakatan umum untuk menentukan nilai penting suatu sumber daya budaya. Namun, untuk menentukan strategi pengelolaan sumber daya budaya diperlukan nilai penting yang terukur (Pearson dan Sullivan 1995). Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis nilai penting berdasarkan data yang didapat. Kemudian dilakukan identifikasi nilai penting sumber daya budaya dalam aspek ilmu pengetahuan, arsitektural, etnik, dan publik yang dikembangkan berdasarkan konsep nilai penting, baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun UUCB. Hasil analisis nilai penting dapat dijadikan dasar pijakan dalam menyusun tujuan-tujuan pengelolaan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Sumber Daya Budaya**

Fenomena arkeologi di Kalimantan ditandai dengan banyaknya bangunan berbahan kayu. Walaupun demikian, ditemukan pula bangunan-bangunan yang dibuat dari bahan batu bata. Bangunan yang dibangun menggunakan bahan organik seperti kayu sulit terpreservasikan akibatnya mudah terurai atau terbakar, sehingga sering kali menyulitkan penelitian. Oleh karena kondisi tersebut, penelitian ini akan menjelaskan sumber daya budaya yang masih ada di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam upaya memudahkan pemahaman gambaran umum sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut,

#### *Astana Al-Nursari*

Astana Al-Nursari ([Gambar 1](#)) merupakan kompleks yang terdiri atas Bangunan Utama serta Pagongan dan terletak ± 150 meter (m) dari tepi Sungai Lamandau. Astana Al-Nursari merupakan tempat tinggal keluarga Kerajaan Kotawaringin. Astana ini dibangun pada tahun 1867 setelah pusat kota pemerintahan Kerajaan Kotawaringin berpindah ke Pangkalan Bun. Perpindahan ini terjadi pada masa Raja Kotawaringin ke-9 M, yaitu Pangeran Ratu Imanuddin atau bergelar Datuk Kuta Batu. Perpindahan dilakukan secara bertahap sambil menunggu pembangunan Istana Kuning dari tahun 1809—1811.

Astana Al-Nursari menempati area berpagar kayu ulin dengan luas 100 x 100 m<sup>2</sup> Halaman dibagi atas dua area, halaman luar merupakan lahan terbuka yang berhubungan langsung dengan akses jalan umum dan halaman dalam yang merupakan area tertutup yang dibatasi oleh pagar keliling. Pada halaman depan astana masih terpancang tiang bendera yang terbuat dari kayu ulin. Bangunan astana menggunakan konstruksi kayu dengan arsitektur rumah panggung dengan tinggi kolong hampir dua meter. Bagian dalam astana ini ditopang pilar-pilar kayu ulin yang tinggi sebagai saka gurunya. Bentuk, ukuran, dan tata ruang bangunan astana yang terbuat dari bahan kayu ulin ini masih asli hingga kini. Penggantian dilakukan terhadap bagian yang rusak dengan menggunakan bahan dan bentuk yang sama sesuai dengan prinsip pemugaran cagar budaya.

Struktur ruang bangunan dengan panjang 59 m dan lebar 32 m, terdiri atas Balai Buntar pada bagian depan. Bangunan ini merupakan bangunan terbuka berpagar besi. Di belakang Balai Buntar terdapat Bangsal yang difungsikan sebagai ruang pertemuan. Selanjutnya, bangunan perantara Bernama Balai Rumbang yang menghubungkan Bangsal dengan Rumah Besar. Rumah besar sendiri merupakan bangunan utama Astana Al-Nursari yang digunakan sebagai ruang keluarga. Pada bagian utara Rumah Besar terdapat Anjung yang

merupakan ruangan berisi kamar-kamar. Pada bagian belakang Astana Al-Nursari terdapat pula dapur yang digunakan untuk melakukan aktivitas rumah tangga.



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

**Gambar 1** Kondisi aktual Astana Al-Nursari

Pada sisi utara Astana Al-Nursari terdapat Pagongan (**Gambar 2**). Pagongan dimanfaatkan untuk menyimpan barang-barang yang diperdagangkan dan memiliki nilai tinggi, warisan kerajaan, pusaka raja. Bangunan Pagongan menggunakan konstruksi kayu dengan arsitektur rumah panggung dengan bentuk persegi panjang ( $7 \times 2,5 \text{ m}^2$ ) dan memiliki atap tumpang.



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

**Gambar 2** Kondisi Aktual Pagongan, di Sebelah Utara Astana Al-Nursari

Berbagai benda pusaka keraton dan benda lain yang masih dikeramatkan disimpan di rumah tersebut, seperti meriam beranak yang terdiri atas satu meriam ukuran tanggung (yang dianggap sebagai induk) dan lima



meriam kecil yang disebut sebagai anak. Ada juga tiga gong yang berkaitan dengan mitos Putri Junjung Buih sebagai mitologi yang menurunkan raja-raja Banjar; berbagai bentuk dayung, bejana, dan satu nekara perunggu. Menurut Gusti Samudra, salah satu keturunan dari Kerajaan Kotawaringin, meriam beranak tersebut merupakan meriam milik suku Dayak yang diserahkan kepada raja yang masih berkuasa pada masanya. Hingga kini masih ada masyarakat Dayak yang berkunjung atau berziarah ke rumah meriam beranak.

### *Makam Kuta Tanah*

Pada bagian barat Astana Al-Nursari terdapat Makam Kuta Tanah ([Gambar 3](#)) yang merupakan makam raja kedua hingga raja kedelapan Kerajaan Kotawaringin beserta keluarganya. Area pemakaman ini berukuran 20 x 30 meter dibatasi pagar kayu ulin. Makam Kuta Tanah merupakan kompleks pemakaman raja-raja Kotawaringin sebelum kerajaan berpindah ke Pangkalan Bun. Pada area pemakaman ini terdapat ± 30 makam yang belum teridentifikasi akibat tidak adanya tulisan nama pada makam. Selain tidak adanya identitas pada makam, riwayat mengenai makam juga terputus karena ahli waris telah meninggal sehingga informasi yang dimiliki oleh ahli waris saat ini terbatas.



Sumber: Dok. Komunitas Karya Masoraian

**Gambar 3** Kondisi Aktual Makam Kuta Tanah, di Sebelah Barat Astana Al-Nursari

Sebagian makam yang terdapat di Makam Kuta Tanah menggunakan nisan dan jirat dari kayu ulin. Pada area pemakaman Kuta Tanah, nisan menjadi sebuah penanda jenis kelamin. Nisan berbentuk gada merupakan penanda untuk makam laki-laki, sedangkan makam perempuan memiliki bentuk nisan pipih. Selain bentuk nisan, penanda lainnya berupa motif flora. Motif flora pada jirat dan nisan makam perempuan lebih raya daripada makam laki-laki

Terdapat satu makam dengan nisan berbentuk pipih yang diduga merupakan makam istri Pangeran Ratu Begawan. Dugaan tersebut didasari atas pahatan huruf Arab yang dibaca sebagai,

“Jumadil akhir yaumil isnaini pukul 11 Ratu Begawan binti Pangeran Kotawaringin” ([Gambar 4](#))

Inskripsi tersebut di atas menunjukkan nama yang dimakamkan, yaitu Ratu Begawan binti Pangeran Kotawaringin, dan waktu meninggal pada hari Senin pukul 11.00. Selain kata “binti” yang merujuk pada nama perempuan, pada nisan kayu yang berbentuk pipih terdapat pula nama “Ratu Begawan binti Pangeran” yang menjadi indikasi makam perempuan. “Ratu Begawan binti Pangeran Kotawaringin” kemungkinan merupakan istri dari Pangeran Ratu Begawan. Akan tetapi, inskripsi tersebut tidak menyebutkan waktu lengkap meninggalnya Ratu Begawan binti Pangeran Kotawaringin.



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

**Gambar 4** Nisan Dengan Inskripsi Huruf Arab yang Terbaca sebagai Makam Ratu Begawan, di Makam Kuta Tanah

#### *Masjid Kyai Gede atau Masjid Jami' Kotawaringin*

Masjid Kyai Gede ([Gambar 5](#)) terletak di tepi Sungai Lamandau. Secara arsitektural masjid dengan konstruksi panggung ini memiliki keunikan karena gaya arsitekturnya yang menyerupai Masjid Agung Demak. Masjid Kyai Gede memiliki ruang utama berukuran 16 x 16 m<sup>2</sup> yang ditopang dengan empat tiang utama dan 32 tiang pendukung. Tiang-tiang utama tersebut diukir dengan motif sulur dan spiral yang sangat raya dan indah. Selain ruang utama dan mihrab, masjid juga dilengkapi dengan ruang serambi yang merupakan ruang tambahan. Atap masjid berbentuk tumpang tiga berbahan sirap dengan ornamen bunga tiga tangkai pada bagian puncaknya. Pada bagian bawah ujung atap terdapat ornamen sulur. Selain bangunan inti, Masjid Kyai Gede juga memiliki bangunan kecil yang difungsikan sebagai tempat berwudhu. Selain itu, pada halaman masjid terdapat jam matahari yang terbuat dari bahan kayu.

Nama Masjid Kyai Gede diambil dari nama pendiri masjid tersebut, yaitu Kyai Gede. Terdapat dua versi asal-usul Kyai Gede. Versi pertama menyatakan bahwa Kyai Gede merupakan orang asli Kalimantan dari suku Dayak. Menurut Sofianto dan Pinem, Masjid Kyai Gede dibangun pada tahun 1632 M setelah Kyai Gede mendapatkan pengetahuan agama Islam dari Sunan Giri di Gresik. Sementara itu, versi kedua menyebutkan bahwa Kyai Gede adalah seorang ulama dari Kerajaan Demak. Beliau adalah utusan kerajaan tersebut yang diamanati menyebarkan agama Islam di Pulau Kalimantan. Dengan ditemani oleh beberapa pengikutnya, ia berdakwah di Kalimantan pada tahun 1591 ketika Kerajaan Banjar diperintah Sultan Mustain Billah. Kedatangan Kyai Gede disambut baik oleh Sultan Mustain Billah. Kemudian Kyai Gede ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kotawaringin ([Jejak Arkeologi di Kotawaringin Lama Kalimantan Tengah 2021](#)).



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

**Gambar 5** Kondisi Aktual Masjid Kyai Gede, Sekitar 100 M Sebelah Timur Laut Astana Al-Nursari

Berkat jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam dan membangun wilayah Kotawaringin, Sultan Mustain Billah menganugerahkan jabatan kepada Kyai Gede sebagai adipati di Kotawaringin dengan pangkat Patih Hamengkubumi dan bergelar Adipati Gede Ing Kotawaringin, disebut juga Dipati Ngganding (Ras 1990).

#### *Danau Masoraian*

Danau Masoraian merupakan salah satu danau tapal kuda di Kotawaringin Barat. Menurut Brown, danau tapal kuda terbentuk ketika suatu sungai mencapai dataran rendah hingga mengakibatkan alirannya acap kali berkelok-kelok. Hingga pada saatnya, sisi luar suatu kelokan terus bergeser sampai mendekati sisi luar kelokan lain di dekatnya dan akhirnya kedua kelokan tersebut menyatu (Brown 2006).

Danau Masoraian memiliki kawasan konservasi seluas  $\pm$  250 hektar (ha) yang dikelilingi oleh ekosistem hutan hujan lahan basah. Danau Masoraian menjadi salah satu sumber plasma nutfah perikanan terbaik di Kotawaringin Barat. Selain itu, Danau Masoraian juga menjadi rumah flora dan fauna endemik seperti orangutan, bekantan, uwa-uwa, lutung, *kelas* (lutung merah), dan burung *ginti*. Danau Masoraian juga merupakan tempat Raja Kotawaringin mencari ikan (Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 2018).

#### **Nilai Penting Sumber Daya Budaya Kerajaan Kotawaringin**

Sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, arsitektural, etnik, dan publik yang mendasari upaya pengelolaan. Nilai penting tersebut didasari oleh pemahaman individu maupun masyarakat pendukungnya (Diaz-Andreu 2017). Hasil analisis nilai penting sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin dapat dimanfaatkan menjadi pijakan dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya budaya tersebut. Analisis nilai penting sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin menggunakan kriteria-kriteria yang dirumuskan oleh Schiffer dan Gumerman sebagaimana telah dirangkum oleh Tanudirjo (2004). Peneliti melakukan penyesuaian terhadap kriteria-kriteria nilai penting tersebut agar dapat diimplementasikan



dalam penyusunan strategi pengelolaan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin. Uraian hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut,

#### *Nilai Penting Ilmu Pengetahuan*

Kriteria untuk menentukan nilai penting ilmu pengetahuan, menurut [Tanudirjo \(2004\)](#) adalah kemampuan sumber daya budaya untuk membuktikan diri berpotensi untuk diteliti lebih lanjut serta mampu menjawab permasalahan dalam bidang keilmuan tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut dalam tataran keilmuan arkeologi dan sejarah sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin sangat layak diteliti lebih lanjut untuk menjawab proses-proses budaya, salah satunya adalah menjawab kronologi perkembangan Kerajaan Kotawaringin serta peran Kerajaan Kotawaringin dalam sejarah Nasional Indonesia.

Pada ranah keilmuan antropologi, sumber daya budaya dapat diteliti lebih lanjut untuk menjawab permasalahan dinamika sosial serta proses kontak budaya antarberbagai etnis yang berada di sekitarnya. Pada ranah keilmuan sosial, sumber daya budaya dapat diteliti lebih lanjut untuk menjawab permasalahan dinamika struktur sosial yang berkembang saat ini. Selain itu, isu mengenai pengaruh kekuasaan politik Kerajaan Kotawaringin juga perlu dikaji lebih dalam. Pada ranah ilmu-ilmu kebumihkaman kawasan ini berpotensi diteliti lebih lanjut untuk menjawab dampak lingkungan pada sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin memiliki nilai penting ilmu pengetahuan.

#### *Nilai Penting Arsitektural*

Sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin memiliki nilai penting arsitektural yang ditandai dengan penggunaan gaya seni dalam pembangunannya. Menurut [Tanudirjo \(2004\)](#), nilai penting arsitektural merupakan segala hal yang mengandung informasi mengenai kemampuan masyarakat pendukung Kerajaan Kotawaringin dalam pembangunan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin. Selain itu, beberapa bangunan mengandung karakteristik etnis tertentu. Astana Al-Nursari memiliki struktur ruang yang mengandung Etnis Melayu pada bagian "balai buntar" dan "bangsal". Kesan arsitektur lokal pada Astana Al-Nursari terdapat pada konstruksi panggung. Selain Astana Al-Nursari, Masjid Kyai Gede atau Masjid Jami' Kotawaringin juga mengandung karakteristik etnis Melayu. Berdasarkan fisiknya, Masjid Kyai Gede atau Masjid Jami' Kotawaringin dirancang dengan pola masjid-masjid klasik Jawa.

Pendapat tersebut berdasarkan denah ruang Masjid Kyai Gede atau Masjid Jami' Kotawaringin yang berbentuk bujur sangkar dan adanya saka guru yang menopang atap berbentuk limasan. Selain itu, pada fondasi dan konstruksi soko guru juga terdapat umpak. Ornamen interior pada saka *guru* juga memiliki kemiripan dengan ornamen sulur khas Jawa.

Jejak arsitektur juga terdapat pada Makam Kuta Tanah. Makam yang ditandai dengan dua nisan dengan orientasi utara-selatan merupakan bukti terdapatnya pengaruh Islam. Beberapa makam yang diduga milik raja Kerajaan Kotawaringin ditandai dengan jirat yang tinggi dan memiliki ornamen kaligrafi.

#### *Nilai Penting Etnik*

Sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin memiliki informasi kehidupan sosial masyarakat pendukung Kerajaan Kotawaringin yang berkaitan dengan keturunan, adat dan agama. Dalam cerita tutur dan Hikayat Banjar disebutkan bahwa terbentuknya Kerajaan Kotawaringin tidak terlepas dari kerja sama antara suku Dayak, suku Banjar, dan Jawa. Hikayat tersebut mengisahkan Pangeran Antakusuma yang merupakan putra dari Sultan Banjar (Sultan Mustain Billah) diutus untuk mencari dan memperluas jaringan kerajaan di Kalimantan Tengah. Bersama rombongannya, Pangeran Antakusuma menyusuri pantai selatan Kalimantan, Sungai Sampit, Kuala Pembuang, dan Sungai Arut. Di hulu Sungai Arut, rombongan Pangeran Antakusuma bertemu dengan masyarakat Dayak Arut pimpinan Patinggi Diumpang. Selain itu, rombongan Pangeran Antakusuma juga bertemu dengan Kyai Gede yang merupakan utusan dari Kerajaan Demak di tepi Sungai Lamandau. Berkat dukungan Patinggi Diumpang dan Kyai Gede, Pangeran Antakusuma mendirikan Kerajaan Kotawaringin yang merupakan bagian dari Kerajaan Banjar di tepi Sungai Lamandau, Kotawaringin Lama. Kerajaan Kotawaringin tumbuh dan berkembang sebagai daerah yang multietnis, antara, Bugis, Dayak dan Jawa.



### Nilai Penting Publik

Sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin berpotensi menjadi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan pariwisata dengan tujuan alih pengetahuan kepada masyarakat mengenai sejarah Kerajaan Kotawaringin. Dalam bidang pendidikan, sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin dapat dimanfaatkan untuk bahan ajar di sekolah, baik formal maupun nonformal.

Selain menjadi bahan ajar, sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin dapat dijadikan dasar pengembangan konsep *storynomic tourism*. *Storynomic* adalah pendekatan pariwisata yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, dan menggunakan kekuatan budaya sebagai DNA destinasi wisata (Davis 2011). Dengan berbekal cerita yang menarik, proses pemasaran menjadi berbeda. Suatu cerita yang memiliki nilai ekonomi dapat menarik orang dalam membuat keputusan pembelian. Di bidang pariwisata, nilai ekonomi ini diekstraksi dari cerita rakyat, sejarah narasi lain yang tersedia di kawasan atau destinasi wisata (Kartika dan Riana 2020).

### Strategi Pengelolaan Kawasan Terintegrasi

Pengelolaan yang dirasa tepat adalah dengan melibatkan secara aktif masyarakat pendukung Kerajaan Kotawaringin. Pelibatan tersebut dipandang perlu karena masyarakat lokal merupakan pihak yang mengerti sejarah dan tradisi sebagai sumber daya budaya bukan bendawi Kerajaan Kotawaringin. Sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin, baik yang bendawi maupun bukan bendawi, tidak dapat dilihat hanya dalam konteks arkeologi saja. Konteks tersebut harus dilihat pada keterkaitan antara tradisi tersebut dari masa silam dengan kehidupan masyarakat kini, baik yang menyangkut kepentingan akademis, sosial, ekonomis, ideologis, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin hendaknya dikembalikan pada hakikat keberadaannya di tengah kehidupan komunitas sekarang yang mewariskan perilaku dan tradisi pendahulunya.

Salah satu model pengelolaan integrasi yang dapat diterapkan pada dua kawasan lindung tersebut adalah ekomuseum. Ekomuseum adalah lembaga yang mengelola, mempelajari, dan memanfaatkan, baik secara ilmiah dan edukatif maupun secara umum, seluruh sumber daya budaya termasuk seluruh lingkungan alam (Davis 2011). Model pengelolaan ini dapat menjadi wahana masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya sumber daya budaya. Pada ekomuseum, sumber daya budaya ditempatkan pada konteksnya. Ekomuseum menjadikan suatu kawasan dengan batasan tertentu sebagai tempat untuk memamerkan sumber daya budaya yang dikemas melalui aktivitas keseharian masyarakat yang selaras dengan sumber daya budaya bukan bendawi yang terdapat di Kerajaan Kotawaringin.

Pada implementasi ekomuseum, informasi yang disampaikan merupakan hasil interpretasi masyarakat pendukung dan merupakan ciri khas daerah tersebut. Ciri khas tersebut bisa saja juga dimiliki daerah lainnya. Akan tetapi, pengalaman berupa interaksi dengan masyarakat ketika mengunjungi sumber daya budaya Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat ditemukan di daerah lain. Masyarakat memiliki peran dalam membangun suasana tersebut melalui kegiatan keseharian interaksi sosial. Pengunjung juga dapat melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat sebagai bentuk interaksi pengunjung dengan masyarakat. Informasi yang disajikan oleh penduduk tersebut merupakan sarana untuk membangun suasana agar pengunjung mendapatkan *sense of a place*.

Menurut Kazuoki Ohara, konsep ekomuseum memiliki tiga unsur penting, yakni museum, pelestarian sumber daya budaya, pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat dan pelestarian lingkungan, sebagai ruang yang menampilkan sumber daya budaya (Ohara dan Yanagida 2006). Diharapkan melalui model pengelolaan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menjalankan misi melestarikan sumber daya budaya dan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### PENUTUP

Sumber daya budaya yang terdapat di Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah memiliki nilai penting. Keseluruhan nilai penting tersebut sudah selayaknya dapat dijadikan sebagai dasar dari upaya lanjutan berupa pengelolaan kawasan cagar budaya yang berintegrasi dengan Kawasan Lindung Geologi

mengingat luasan dan posisi antar situs yang menghasilkan data yang saling berkaitan. Integrasi pengelolaan dua kawasan lindung tersebut merupakan suatu langkah awal sebelum kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara praktis yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan dan Indonesia secara umum.

Langkah awal tersebut sesuai dengan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berbunyi "Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata untuk melestarikan situs budaya dan kesenian lokal". Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merencanakan pelestarian situs budaya dan kesenian lokal guna mengembangkan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin. Walaupun situs yang tersisa hanya dapat merefleksikan penggalan sejarah Kerajaan Kotawaringin, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu melestarikan pula sumber daya budaya bukan bendawi atau tak teraba (*intangible*) yang menjadi satu-kesatuan dengan sumber daya bendawi atau teraba (*tangible*) tersebut.

Selanjutnya, para *stakeholder* seperti pemerintah, komunitas dan pemilik sumber daya budaya, serta akademisi, dapat bersinergi dalam pengembangan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin. Secara lebih detail arah pengembangan yang diperlukan adalah pengembangan lingkungan yang meliputi revitalisasi sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin, pengembangan amenitas, dan pengembangan aksesibilitas. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin sebagai atraksi wisata dengan penyusunan paket wisata terintegrasi. Dengan demikian, perlu dikembangkan pula manajemen dan tata kelola sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin serta kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya budaya Kerajaan Kotawaringin maupun komunitas atau masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barat, K. K. 2022. *Rencana Strategis 2017-2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin*. Pangkalan Bun: Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Brown, A. G. 2006. *Alluvial Geoarchaeology: Floodplain Archaeology and Environmental Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Davis, P. 2011. *Ecomuseums: A Sense of Place* (Second). London: Continuum International Publishing Group.
- Díaz-Andreu, M. 2017. Heritage Values and the Public. *Journal of Community Archaeology and Heritage* 4(1): 2–6. <https://doi.org/10.1080/20518196.2016.1228213>
- Fadilah, M. A. 2021. Jejak Arkeologi di Kotawaringin Lama Kalimantan Tengah. *Kundungga* 9: 65-84.
- Kartika, T. and N. Riana. 2020. Storynomics Tourism as an Effective Marketing Strategy on Tourism Destination (Case Study on Tangkuban Parahu, West Java-Indonesia). *Tourism and Sustainable Development Review* 1(1): 33–40. <https://doi.org/10.31098/tsdr.v1i1.8>
- Ohara, K., and A. Yanagida. 2006. "Ecomuseum in Current Japan and Ecomuseum Network of Miura Peninsula." The Third *International Conference of Ecomuseum and Community Museum*.
- Pearson, M., and S. Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places: The Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, 2018.
- Ras, J. J. 1990. *Hikayat Bandjar*. Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 2010.
- Veal, A. J. 2006. *Research Methods for Leisure and Tourism A Practical Guide*. London: Pearson Education Limited.